

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini pengguna laporan keuangan tidak hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga bisa berasal dari luar negeri, hal ini mendorong dewan standar akuntansi di berbagai negara untuk meningkatkan kualitas dan daya banding laporan keuangan. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan daya banding tersebut adalah dengan mengadopsi standar akuntansi internasional, secara umum manfaat dari mengadopsi hal tersebut adalah pengguna laporan keuangan dapat memahami isi laporan keuangan dengan baik, meningkatkan arus investasi, membuka peluang fund raising melalui pasar modal, menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Menurut Nunik (2016) dengan mengadopsi standar akuntansi internasional dapat memperoleh informasi yang berdaya banding secara global, tidak menimbulkan informasi yang asimetris (*asymetric information*) dan untuk mencegah *moral hazard*.

Para manajemen perusahaan, menyediakan inovasi keuangan yang bermanfaat melalui laporan keuangan merupakan salah satu cara bagi perusahaan guna mendapatkan tambahan dana dari investor, khususnya perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebaliknya, investor dalam menganalisis laporan keuangan investor harus dapat mengevaluasi dan

memproyeksi aktivitas keuangan suatu bisnis atau perusahaan, agar mendapatkan informasi secara relevan dari suatu laporan keuangan (Subramanyam dan Wild, 2009)

Nilai wajar (*fair value*) telah menjadi prinsip penting dalam pengukuran akuntansi internasional. Fahmi (2014) berpendapat bahwa beberapa tahun terakhir telah terjadi pergeseran dalam pengukuran akuntansi menuju pengukuran berbasis nilai wajar. Penerapan pengukuran berbasis nilai wajar didorong oleh perkembangan regulasi internasional menuju harmonisasi standar.

Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan yang pada gilirannya akan membantu pencapaian tujuan ekonomik dan sosial negara (Suwardjono, 2005). Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan mengenai entitas pelapor kepada investor sekarang dan investor potensial serta pemberi pinjaman dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas (IAI, 2016). Untuk menilai kualitas teknologi laporan keuangan dapat dilihat dari kemampuan teknologi laporan keuangan tersebut dalam memenuhi tujuan pelaporan keuangan.

Dalam menyusun, menyiapkan, dan menyajikan laporan keuangan dibutuhkan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Namun, dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan masih memungkinkan terjadinya kelalaian untuk mencantumkan dan kesalahan dalam mencatat laporan keuangan entitas untuk

satu atau lebih periode sebelumnya. Kesalahan tersebut dapat diakibatkan oleh dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan (*oversights*) atau kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan (PSAK No. 25) yang mengharuskan untuk dilakukannya penyajian kembali laporan keuangan (*restatements*).

Berdasarkan teori keagenan, informasi yang disajikan oleh manajemen (*agent*) dalam laporan keuangan memungkinkan untuk menyesatkan atau dimanipulasi sehingga merugikan *principal* (pemilik) dan pihak-pihak lain yang menggunakan informasi dalam laporan keuangan. Sementara itu, standar akuntansi juga memberi keleluasaan (*discretion*) bagi badan usaha untuk memilih perlakuan akuntansi yang paling sesuai dengan kondisi badan usaha (Suwardjono, 2005). Lin et al., (2017) menemukan bahwa beberapa penyajian kembali cenderung dikaitkandengan kompleksitas transaksi, manipulasi yang disengaja serta pengukuran nilai wajar level 3.

Lin et al., (2017) menemukan bahwa hubungan antara pengukuran nilai wajar (level 3) dengan *restatements* pada laporan keuangan didorong oleh penyajian kembali yang disebabkan oleh kesalahan dan manipulasi manajerial. Lin et al., (2017) berpendapat bahwa sebagian besar transaksi bisnis yang terkait dengan nilai wajar level 3 bersifat kompleks. Selain itu, nilai wajar level 3 ditentukan oleh kebijaksanaan manajemen, dan dianggap kurang dapat diandalkan daripada nilai wajar level 1 dan level 2 yang didasarkan pada harga pasar yang dapat diamati. Oleh karena itu, manajer yang bersifat *oportunis (self-interested manager)* dapat terdorong untuk lebih-lebihkan masukan level 3

guna memanipulasi posisi dan kinerja keuangan. Fenomena Enron, Kimia Farma dan Toshiba merupakan beberapa contoh dari perbuatan manajemen perusahaan yang bersifat *oportunis*. Penyajian kembali akuntansi merupakan bukti dari karakteristik akuntansi yang penuh dengan estimasi dan ketidakpastian dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Karakteristik akuntansi inilah yang dimanfaatkan demi keuntungan sedikit pihak dan mengorbankan banyak pihak yang berkepentingan dengan informasi keuangan pada laporan keuangan. Hal inilah yang menyebabkan kualitas pelaporan keuangan selalu dipertanyakan.

Nilai wajar didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran (PSAK 68:09). Entitas mengukur nilai wajar suatu aset atau liabilitas menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomik terbaiknya (PSAK 68:22). Dalam mengembangkan asumsi tersebut, entitas tidak perlu mengidentifikasi pelaku pasar yang spesifik.

Tabel 1.1
Nilai Wajar Aset Perusahaan Sektor Keuangan di BEI
Periode 2018-2021 (Rupiah)

Perusahaan	Tahun	Nilai Wajar	Pertumbuhan (%)
BRI	2018	Rp22.922.269.749	0,00
	2019	Rp26.603.228.760	13,84
	2020	Rp26.937.378.344	1,24
	2021	Rp1.565.377.719	-1620,82
MANDIRI	2018	Rp829.613.934	0,00
	2019	Rp925.959.663	10,40
	2020	Rp911.353.379	-1,60
	2021	Rp1.171.445.156	22,20

BCA	2018	Rp4.782.092	0,00
	2019	Rp5.910.146	19,09
	2020	Rp2.936.245	-101,28
	2021	Rp2.447.163	-19,99
BNI	2018	Rp775.653.192	0,00
	2019	Rp813.008.350	4,59
	2020	Rp854.061.853	4,81
	2021	Rp889.593.620	3,99
BTN	2018	Rp298.441.267	0,00
	2019	Rp303.709.168	1,73
	2020	Rp349.883.505	13,20
	2021	Rp361.687.686	3,26

Sumber : Bursa Efek Indonesia 2022

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan fenomena penelitian, nilai wajar mengalami fluktuasi dilihat dari di PT. BRI pada tahun 2019 mengalami kenaikan 13,84% , sedangkan 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,24%, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan drastis sebesar -1620,82%. Pada PT. Mandiri pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 10,40%, sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -1 ,60% dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 22,20%. Pada PT BCA tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 19,09%, tahun 2020 mengalami penurunan -101,28% dan tahun 2021 -19,99%. PT. BNI pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 4,59% dan tahun 2020 juga mengalami kenaikan sebesar 4,81% sedangkan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 3,99%. Sedangkan PT BTN pada tahun 2019 mengalami kenaikan 1,73%, pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 13,20% dan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 3,26%.

Pada umumnya, kewajiban bagi penyaji laporan keuangan untuk dapat memenuhi harapan para pemakai laporan keuangan dikarenakan laporan keuangan

yang merupakan catatan tertulis berisi kinerja manajemen dalam satu periode telah dipandang sebagai media yang digunakan untuk menurunkan jarak perbedaan informasi antara pihak manajemen perusahaan dan pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditur.

Tidak sedikit perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah menyajikan laporan keuangan setelah diaudit juga melakukan pelaporan kembali (*restatement*) laporan keuangan yang telah diterbitkan kepada publik atau kepada investor. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan apa penyebab laporan keuangan yang sudah diterbitkan tetapi di *restatement*. Penyebab kesalahan dalam interpretasi informasi oleh para pengguna yaitu kesalahan pada penyajian laporan keuangan tersebut.

Tabel 1.2

Data Penyajian kembali Laporan Keuangan (*restatement*)

Bank	Tahun	Restatement	Keterangan
BRI	2018	Ada	Laporan Konsolidasi
	2019	Tidak Ada	-
	2020	Ada	Laporan Konsolidasi
	2021	Ada	Laporan Konsolidasi
MANDIRI	2018	Ada	Laporan Konsolidasi
	2019	Ada	Laporan Konsolidasi
	2020	Tidak Ada	-
	2021	Ada	Laporan Konsolidasi
BCA	2018	Tidak Ada	-
	2019	Ada	Laporan Konsolidasi
	2020	Tidak Ada	-
	2021	Tidak Ada	-
BNI	2018	Ada	Laporan Konsolidasi
	2019	Tidak Ada	-
	2020	Ada	Laporan Konsolidasi
	2021	Ada	Laporan Berkelanjutan

BTN	2018	Tidak Ada	-
	2019	Tidak Ada	-
	2020	Ada	Laporan Berkelanjutan
	2021	Tidak Ada	-

Sumber : *Idx.co.id*

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa adanya penyajian kembali laporan keuangan (*restatement*) pada beberapa perusahaan perbankan. Pada Bank BRI terjadi pada tahun, 2018, 2020,2021 berupa laporan konsolidasi, kemudian Bank Mandiri adanya laporan konsolidasi pada tahun 2018, 2019, 2021. Pada Bank BCA adanya laporan konsolidasi pada tahun 2019. Pada Bank BNI adanya laporan konsolidasi dan laporan keberlanjutan tahun 2020.

Oleh karena fenomena diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada seluruh perusahaan sektor keuanganyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode pengamatan tahun 2018-2021 Selain itu, apabila perusahaan terdaftar dalam indeks saham keuangan perusahaan tersebut diatur sesuai dengan persentase tertentu. Di mana keuangan perusahaan tersebut mengandung komponen liabilitas dan aset yang diukur dengan nilai wajar. Hal tersebut mengindikasikan adanya aturan membatasi besaran aset dan liabilitas memiliki dampak pada pengukuran aset dan liabilitas melalui akuntansi nilai wajar, sehingga manajer sulit mendapatkan peluang untuk melakukan manajemen laba melalui pengukuran nilai wajar atas aset.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti mengambil judul proposal skripsi **HUBUNGAN PENGUKURAN NILAI WAJAR DAN PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS**

PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2018-2021)

1.2 Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Batasan Masalah

Dikarenakan keterbatasan peneliti, maka dapat disimpulkan batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di bursa efek indonesia dan perusahaan 5 terbesar di sektor keuangan berdasarkan asetnya (*Versi Money Compas dan Finansial Bisnis.com*).
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di jelaskan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana hubungan pengukuran nilai wajar dan penyajian kembali laporan keuangan dibursa efek indonesia pada tahun 2018-2021?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

“Untuk mengetahui bagaimana hubungan pengukuran nilai wajar dan penyajian kembali laporan keuangan dibursa efek indonesia pada tahun 2018-2021.”

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memperluas wawasan dan menambah pengetahuan.

2. Bagi Perusahaan Sektor Keuangan

Memberikan masukan yang bermanfaat melalui penelitian ini, dan peneliti berharap agar dapat memberikan pertimbangan untuk kemajuan Perusahaan Sektor Keuangan

3. Bagi peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi dan bahan perbandingan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian jika berhubungan dengan penelitian ini.

